

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan meliputi: penyediaan pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan masyarakat, fungsi perwakilan, dan fungsi koordinasi dan perencanaan (Adisasmita, 2014: 14). Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dengan pemuda menjadi cukup jelas dan strategis. Keduanya bermitra menjalin kerja sama untuk melaksanakan pembangunan.

Pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu diwadahi oleh sebuah organisasi. Organisasi merupakan kerangka struktur yang pekerjaan-pekerjaan di dalamnya diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (Millet, dalam Syafiie dan Welasari, 2014: 71). Salah satu contoh organisasi kepemudaan yang besar di negeri ini adalah Karang Taruna.

Karang Taruna dikenal sebagai sebuah organisasi yang menaungi masyarakat khususnya kalangan pemuda berusia 13 (tiga belas) sampai 45 (empat puluh lima)

tahun, dan berkedudukan di desa atau kelurahan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna. Pemberdayaan Karang Taruna merupakan suatu proses pengembangan dan peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan kepada Karang Taruna untuk memecahkan masalah dan mengembangkan potensinya melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada.

Dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan tersebut, Karang Taruna sendiri bersama dengan pemerintah serta masyarakat bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Karang Taruna berfungsi sebagai: 1) garda terdepan mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya pada generasi muda; 2) menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan mengadakan pendidikan serta pelatihan setiap anggota masyarakat khususnya kalangan muda; 3) meningkatkan usaha ekonomi produktif (UEP); 4) menumbuhkan dan memelihara serta memperkuat kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat khususnya kalangan muda untuk berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial; 5) menumbuhkan, memelihara, dan memperkuat kearifan lokal, serta; 6) mempertahankan semangat kebangsaan.

Penyelenggaraan pemberdayaan Karang Taruna pada sebuah wilayah tidak lain adalah untuk menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan upaya Karang Taruna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu, terarah, menyeluruh dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial merupakan capaian yang diharapkan oleh masyarakat dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Di wilayah Kabupaten Bandung Barat masalah kesejahteraan sosial sendiri masih muncul, kemiskinan merupakan salah satu isu strategis yang belum bisa dipecahkan. Adapun angka kemiskinan di sana pada tahun 2013-2017 tercatat sebagai berikut dengan laju penurunannya yang masih sangat lambat.

Tabel 1.1

Presentase Penduduk Miskin dari Tahun 2013-2017

| No | Presentase | Tahun |
|----|------------|-------|
| 1 | 11,25% | 2013 |
| 2 | 12,26% | 2014 |
| 3 | 12,67% | 2015 |
| 4 | 11,76% | 2016 |
| 5 | 11,45% | 2017 |

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat cenderung fluktuatif meskipun perbaikan program anti kemiskinan telah dilakukan

oleh pemerintah, namun pada kenyataannya masih meninggalkan masalah baik dalam skala nasional maupun lokal. Jika dilihat dari gini rasio Kabupaten Bandung Barat menunjukan laju penurunan kemiskinan yang tidak konsisten, yakni dari tahun 2013-2017 berturut-turut 0.31, 0.32, 0.34, 0.35, dan 40.5 (Kabupaten Bandung Barat 2019).

Menurut data BPS tahun 2019 sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat adalah industri pengolahan sebesar 39,78%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,45%, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,15%. Tingginya angka tersebut belum mampu mereduksi kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik saja tidak cukup sebagai prasyarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Hasibuan, Juanda dan Mulatsih, 2019: 81). Berkaitan dengan hal itu, Kecamatan Padalarang yang merupakan wilayah industri besar di Kabupaten Bandung Barat masih berkuat dengan masalah yang relevan, yakni pengangguran.

Tabel 2.1

Jumlah Perusahaan Menurut Skala Usaha di Kecamatan Padalarang

| No | Skala Usaha | Jumlah Usaha |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 1 | Usaha Mikro Kecil | 15.600 |
| 2 | Usaha Menengah Besar | 354 |

Sumber: Sensus Ekonomi 2016

Dimana Desa Padalarang sendiri sebagai desa yang memiliki organisasi Karang Taruna terbanyak di Kecamatan Padalarang yakni sebanyak 30 Karang Taruna – tingkat penganggurannya masih tinggi, ada sebanyak 1.356 jiwa belum memiliki pekerjaan (BPS Kabupaten Bandung Barat). Padahal pemuda amat memiliki peran dalam peningkatan pendapatan seperti diungkap Manik dalam penelitiannya bahwa pemuda secara demografi ekonomi merupakan asset untuk menggerakkan pembangunan namun di sisi lain pemuda dapat menjadi beban, oleh karenanya keberadaan pemuda perlu dikelola secara efektif (Manik, 2016). *International Labour Organization (ILO)* juga menemukan bahwa mayoritas penduduk usia muda di Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik karena mereka tidak mempunyai akses terhadap pekerjaan yang baik. Padahal peningkatan kemitraan yang merupakan salah satu tujuan Karang Taruna masih mungkin dilakukan dengan pihak industri setempat sehingga lapangan kerja untuk warga lokal bisa terbuka, selain itu proses pemberdayaan yang dilaksanakan dengan baik dapat membuka peluang usaha ekonomi produktif dan kualitas sumber daya untuk berkembang. Sayangnya hal tersebut tidak nampak dimaksimalkan oleh Karang Taruna.

Keberadaan generasi muda sebagai tonggak kokohnya bangsa pun memerlukan jembatan untuk diberdayakan. Mengingat membiarkan kehidupan sosial tidak saling memahami adalah hal yang riskan, maka berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang

Taruna (Studi Kasus di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat)''.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di muka, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak berjalannya pemberdayaan Karang Taruna di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
2. Tidak aktifnya anggota Karang Taruna dalam mencegah masalah kesejahteraan sosial di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

E. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa harapan dalam dilakukannya penelitian ini, salah satunya adalah dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, baik dilihat dari kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat secara mendalam memberikan pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran baru diranah Administrasi Publik.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilaksanakan sebagai implementasi pengetahuan yang telah didapat sehingga bermanfaat untuk mengembangkan wawasan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya agar lebih maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial nomor 23 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai pemberdayaan Karang Taruna.

F. Kerangka Pemikiran

Teori implementasi telah banyak dibuat dan dipakai oleh berbagai kalangan untuk menjadi acuan pelaksanaan sebuah kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori dari Mazmanian dan Sabatier yang termaktub dalam Nawawi (2009: 145) bahwa ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, ketiga variabel tersebut adalah:

1. Karakteristik Masalah

- 1) Kesulitan permasalahan yang dihadapi;
- 2) Kemajemukan dari kelompok sasaran;
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
- 4) Lingkup dan cakupan perubahan perilaku kelompok sasaran yang dikehendaki.

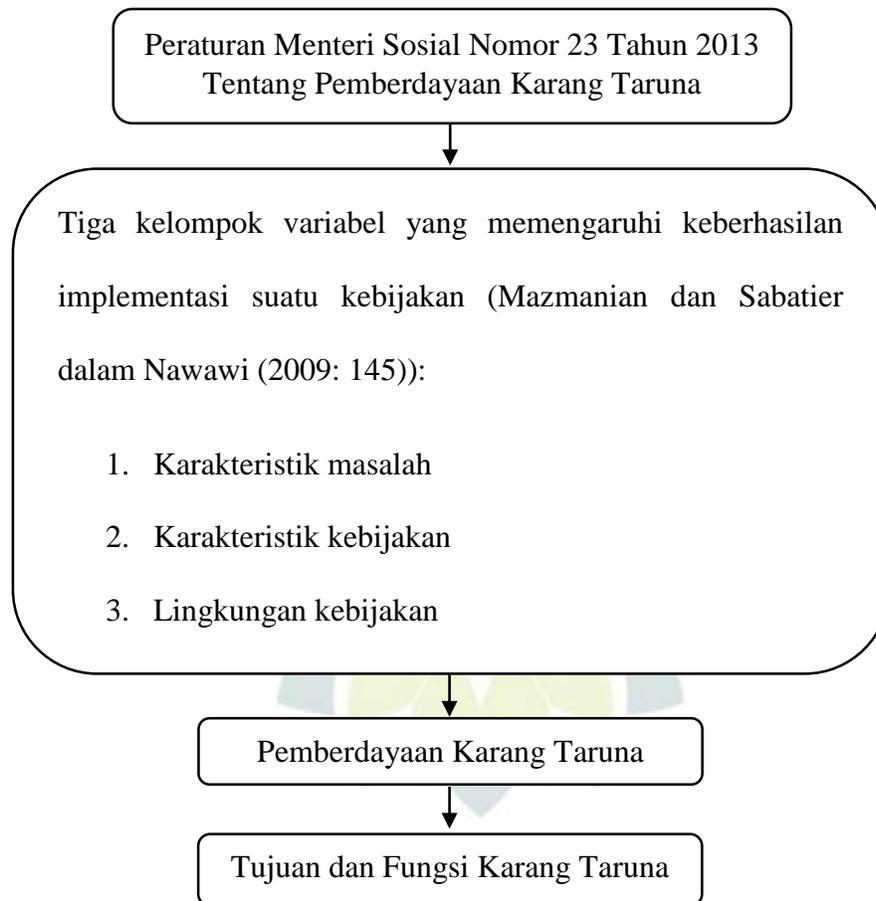
2. Karakteristik Kebijakan

- 1) Kejelasan isi kebijakan yang diimplementasikan;
- 2) Dukungan teoritis yang menjadikan kebijakan tersebut lebih mapan dan teruji;
- 3) Alokasi sumber daya manusia, material, dan metode untuk mendukung pelaksanaan kerja, memonitor, dan mengevaluasi kebijakan;
- 4) Dukungan dan ketertarikan berbagai instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana kebijakan tersebut;

- 6) Adanya komitmen dari aparat yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan;
 - 7) Akses kelompok luar untuk ikut andil dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Lingkungan Kebijakan
- 1) Kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat;
 - 2) Dukungan publik;
 - 3) Sikap dari kelompok-kelompok pemilih dalam masyarakat;
 - 4) Komitmen dan keterampilan aparat dan implementor dalam mewujudkan tujuan kebijakan.

Dari ketiga variabel yang dikemukakan Mazmanian dan Sabatier tersebut munculah kerangka pemikiran untuk mendukung penelitian ini –yang diramu menjadi sebuah bagan sebagai berikut:





Gambar 1.1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Kerangka Pemikiran
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, implementasi Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Karang Taruna didukung oleh tiga variabel meliputi variabel karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan terpenuhi.